



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pangkalan Pengawasan SDKP Tual adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan *Pangkalan Pengawasan SDKP Tual* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pangkalan Pengawasan SDKP Tual. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tual, 16 Januari 2024

Kepala Pangkalan PSDKP Tual



Sigit Bintoro, S.Pi

19721022 199803 1 004



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL**

JALAN BUKIT DUMAR NOMOR 1 KOMPLEKS PPN TUAL KOTAMADYA TUAL
KODE POS 97611 TELEPON (0916) 21696, FAKSIMILI (0916) 21606
LAMAM <https://kkp.go.id> EMAIL psdkp.tual@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan *Nama satker* yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tual, 16 Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran



[Signature]
Sigit Bintoro, S.Pi

NIP. 19721022 199803 1 004

Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Periode Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp148,856,018,-. sedangkan Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp20,130,167,- atau mengalami kenaikan yang signifikan yaitu mencapai 398,44 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp37,360,000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Tahun Anggaran 2023. Nilai Aset Tahun Anggaran 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp52,970,716,066,- yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp 679,852,246,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp52,290,863,820,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp57,378,467,- dan Rp52,913,337,599,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 108,022,685,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 59,433,298,094,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 59,325,275,409,-). Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Sebelum Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp40,833,333 dan sebesar (Rp59,284,442,076,-) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp59,284,442,076,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp58,059,025,189,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp 59,284,442,076,-) ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas senilai (Rp1,197,008,-) dan dikurangi dengan koreksi nilai aset tetap/lainnya non revaluasi senilai Rp0 ditambah dengan koreksi nilai aset tetap non revaluasi senilai Rp0

dikurangi koreksi nilai aset non revaluasi senilai (Rp7,734,158,-) ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp54,139,951,494,- dan kenaikan/penurunan ekuitas senilai (Rp5,145,687,590,-) sehingga Ekuitas entitas pada Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp52,913,337,599,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	37.360.000	148.856.018	398,44	20.130.167
JUMLAH PENDAPATAN		37.360.000	148.856.018	398,44	20.130.167
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	10.737.188.000	10.737.164.730	100,0	10.462.631.859
Belanja Barang	B.4	42.864.889.000	42.758.635.369	99,8	25.959.172.545
Belanja Modal	B.5	787.802.000	787.787.413	100,0	7.804.693.986
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		54.389.879.000	54.283.587.512	99,80	44.226.498.390

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL NERACA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	16.387.650	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	663.464.596	347.622.190
Jumlah Aset Lancar		679.852.246	347.622.190
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	17.914.787.000	17.914.787.000
Peralatan dan Mesin	C.15	82.660.082.020	85.575.246.691
Gedung dan Bangunan	C.16	18.361.988.619	18.361.988.619
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	24.948.642.274	24.948.642.274
Aset Tetap Lainnya	C.18	142.680.000	142.680.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(91.737.316.093)	(89.150.465.696)
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.21	-	-
Jumlah Aset Tetap		52.290.863.820	57.792.878.888
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	14.300.000	1.573.695.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(14.300.000)	(1.573.695.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		52.970.716.066	58.140.501.078
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.24	57.378.467	81.475.889
Utang yang belum ditagihkan	C.25	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.25	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		57.378.467	81.475.889
JUMLAH KEWAJIBAN		57.378.467	81.475.889
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	52.913.337.599	58.059.025.189
JUMLAH EKUITAS		52.913.337.599	58.059.025.189
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		52.970.716.066	58.140.501.078

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	108.022.685	19.150.167
JUMLAH PENDAPATAN		108.022.685	19.150.167
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	10.720.865.730	10.468.917.859
Beban Persediaan	D.3	380.275.925	274.869.390
Beban Barang dan Jasa	D.4	34.511.042.322	18.788.412.538
Beban Pemeliharaan	D.5	3.695.241.767	4.965.515.993
Beban Perjalanan Dinas	D.6	3.838.534.527	2.172.555.032
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	6.287.288.323	11.479.681.884
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	49.500	-
JUMLAH BEBAN		59.433.298.094	48.149.952.696
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(59.325.275.409)	(48.130.802.529)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar	D.11	40.833.333	(64.626.024)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		40.833.333	980.000
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	65.606.024
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		40.833.333	(64.626.024)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(59.284.442.076)	(48.195.428.553)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(59.284.442.076)	(48.195.428.553)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	58.059.025.189	61.861.649.919
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(59.284.442.076)	(48.195.428.553)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(1.197.008)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	54.139.951.494	44.392.803.823
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS		(5.145.687.590)	(3.802.624.730)
EKUITAS AKHIR	E.5	52.913.337.599	58.059.025.189

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pangkalan Pengawasan SDKP Tual

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Pangkalan Pengawasan SDKP Tual didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur melalui peraturan Menteri Nomor:PER.04/MEN/2006 tanggal 12 September 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan Berdasarkan Persetujuan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara Nomor: B2712/M.PAN/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 di bentuk UPT Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tual yang bersifat lebih operasional dan mandiri, hal ini dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dibebankan pada Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Stasiun Pengawasan SDKP Tual ditingkatkan status kelembagaannya menjadi Pangkalan Pengawasan SDKP Tual setingkat Eselon IIIa yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal PSDKP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Struktur penyusunan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan di dalam Renstra KKP 2020-2024 mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada tingkat kementerian/lembaga menetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis (*outcome/impact*) beserta indikator kinerjanya yang berpedoman pada RPJMN. Selanjutnya unit Eselon I dengan dijabatani oleh Arah Kebijakan dan Strategi, merumuskan Program, Sasaran Program (*outcome*) beserta indikator kinerjanya dan Kegiatan, Sasaran Kegiatan beserta indikator kinerjanya pada tingkat Eselon II.

Visi KKP 2020-2024 yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mewujudkan Visi KKP 2020-2024 tersebut maka dirumuskan Misi KKP 2020-2024, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset

- Kelautan dan Perikanan;
- 2) Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
 - 3) Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - 4) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Sebagai penjabaran Visi dan Misi KKP maka dirumuskan beberapa Tujuan KKP 2020-2024 yang dilengkapi dengan Sasaran Strategis berikut indikator kinerjanya. Pada 5 (lima) tahun ke depan, Ditjen. PSDKP akan berkontribusi pada beberapa Tujuan KKP 2020-2024 berikut ini:

- 1) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui pencapaian Sasaran Strategis Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat dengan indikator kinerja Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024. Formula perhitungan IKMKP dibangun oleh 2 aspek utama yaitu: ekonomi dan sosial-kelembagaan. Data tingkat keaktifan atau partisipasi Pokmaswas akan menjadi salah satu variabel pada aspek sosial-kelembagaan.
- 2) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui pencapaian beberapa Sasaran Strategis, diantaranya:
 - a. Tata kelola SDKP bertanggung jawab dengan indikator kinerja Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, dari 89% pada tahun 2020 menjadi 98% pada tahun 2024;
 - b. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Integratif dengan indikator kinerja:
 - I. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing, dari 54,18% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024; dan
 - II. Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan, dengan target 93% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- 3) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui pencapaian Sasaran Strategis Tatakelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator kinerja berikut ini:
 - a. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari 80 pada tahun 2020 menjadi 85 pada tahun 2024 dan
 - b. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP dari 88

pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

Visi Ditjen PSDKP adalah pembangunan kelautan dan perikanan Direktorat Jenderal PSDKP 2020 - 2024 adalah "Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang terawasi, lestari, dan bermanfaat bagi masyarakat kelautan dan perikanan"

Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka ditetapkan misi :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP
2. Mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP
3. Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP
4. Memastikan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
5. Memastikan kemanfaatan SDKP bagi masyarakat Kelautan dan Perikanan.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020 - 2024 adalah :

1. Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP
2. Terlindunginya SDKP dari kegiatan yang illegal dan merusak
3. Memastikan kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan yang kondusif.

Visi Pangkalan Pengawasan SDKP Tual adalah pembangunan kelautan dan perikanan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual 2020 - 2024 adalah "Pelaksanaan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang terawasi, lestari, dan bermanfaat bagi masyarakat kelautan dan perikanan di Lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Tual"

Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka ditetapkan misi :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual
2. Mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual
3. Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual
4. Memastikan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Wilayah Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual

5. Memastikan kemanfaatan SDKP bagi masyarakat KP di Wilayah Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual tahun 2020 - 2024 adalah :

1. Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di wilayah kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual
2. Terlindunginya SDKP dari kegiatan yang illegal dan merusak Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di wilayah kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual
3. Memastikan kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan yang kondusif Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di wilayah kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual.

Wilayah kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual meliputi 3 Propinsi (Maluku, Papua dan Papua Barat) dan 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni :

- a. WPP 714, meliputi perairan Laut Banda;
- b. WPP 715, meliputi perairan Laut Seram, Laut Halmahera dan Teluk Bintuni;
- c. WPP 718, meliputi Laut Aru dan Laut Arafuru.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Tual terdiri dari 2 (dua) unit kapal pengawas perikanan tipe C, 1 (satu) unit *speedboat* Pengawas ukuran 16 m, 1 (satu) unit *speedboat* Pengawas ukuran 6,5 m, 7 (tujuh) unit *speedboat* Pengawas ukuran 12 m yang tersebar di Satuan Pengawasan dan Wilayah Kerja lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Tual, 1 (satu) unit *Rubber Boat*, 1 (satu) unit *Rigid Inflatable Boat*. Dalam hal prasarana (infrastruktur), Pangkalan Pengawasan SDKP Tual memiliki 1 (satu) kantor pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang merupakan Gedung utama, 3 (tiga) unit kantor Satuan Pengawasan (non Eselon) dan 3 (tiga) unit kantor Wilayah Kerja (non Eselon). Pangkalan Pengawasan SDKP Tual juga memiliki dermaga kapal pengawas perikanan, Gudang barang bukti, serta mini laboratorium. Kemudian prasarana yang sangat diandalkan dalam melakukan pemantauan kapal-kapal ikan adalah *Regional Monitoring Center* (RMC). Pengoperasian RMC mengintegrasikan data dari *Vessel Monitoring System* (VMS), RadarSat, dan *Automatic Identification System* (AIS) sehingga diperoleh informasi yang bermanfaat baik dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam hal operasi pencegahan (*intercept*) oleh armada kapal pengawas.



Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, Pangkalan Pengawasan SDKP Tual didukung oleh 138 (seratus empat puluh dua) orang sumber daya manusia dari tingkat pejabat eselon III sampai dengan pelaksana/staf .

Rincian jumlah pegawai negeri sipil pada Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Sebanyak 91 orang yang terdiri dari Golongan II sebanyak 22 Orang dan Golongan III sebanyak 67 Orang dan Golongan IV sebanyak 2 Orang. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai di alokasikan untuk 91 orang pusat dan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) 47 orang.

Rincian Pegawai Pangkalan Pengawasan SDKP Tual adalah sebagai berikut:

No	Unit Kerja	PNS PUSAT	PNS DAERAH	Pegawai Kontrak
1	Pangkalan PSDKP Tual	31		23
2	WILKER PSDKP Dobo	2		3
3	WILKER PSDKP Warabal	0		2
4	SATWAS Maluku Tenggara Barat	3		2
5	SATWAS Merauke	9		3
6	WILKER Wanam	0		0
7	SATWAS Sorong	7		4
8	WILKER Raja Ampat	2		2
9	SATWAS Mimika	4		3
10	SATWAS Kaimana	2		3
11	WILKER Fakfak	2		1
12	WILKER Wimro	0		1
13	KP. Hiu 14	10		0
14	KP. Hiu Macan 006	14		0
15	KP. ORCA 03	1		0
16	Tugas Belajar	4		0

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.82/MEN/KU.611/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2018 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

EKSISTING	
<i>Kuasa Pengguna Anggaran</i>	<i>Sigit Bintoro, S.Pi</i>
	19721022 199803 1 004

Kerangka pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang kaitannya dengan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan Pengawasan SDKP Tual bersumber dari dana APBN yang direncanakan dengan mempertimbangkan luasan wilayah kerja dan beban kerja pengawasan SDKP yang ada dilapangan dan mengaju pada program kerja yang mendukung visi dan misi Kementerian/Lembaga. Rincian kerangka pendanaan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual terdiri dari:

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pemantauan dan Operasi Armada	Rp 33.130.185.000
2	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp 235.400.000
3	Pengawasan Pengelolaan Sumber daya Kelautan	Rp 753.564.000
4	Pengawasan Pengelolaan Sumber daya Perikanan	Rp 740.000.000
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	Rp 19.530.730.000
Total Anggaran		Rp 54.389.879.000

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Tual. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Pangkalan Pengawasan SDKP Tual menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pangkalan Pengawasan SDKP Tual. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Sehubungan dengan Implementasi Metode Penilaian Persediaan secara First In First Out (FIFO) di Periode 31 Desember Tahun 2023 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal

22 Januari 2021, maka pencatatan transaksi mutasi persediaan baik persediaan masuk dan persediaan keluar agar dilakukan sesuai dengan urutan kronologis transaksi. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - ✓ Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - ✓ Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - ✓ Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan

berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1 .000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai

minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang – undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset

Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- ✚ Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- ✚ Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- ✚ Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitsebbesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pangkalan Pengawasan SDKP Tual telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi DIPA dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali. Rincian revisi terdiri dari:

Revisi DIPA ke-	Tanggal Revisi DIPA	Pertimbangan Revisi DIPA
Revisi ke - 1	27 Desember 2022	Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual serta untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2023
Revisi ke - 2	15 Februari 2023	Diperlukannya pengadaan kendaraan dinas fungsional roda 4 di Pangkalan PSDKP Tual demi menunjang kegiatan Pengawasan di lingkup Pangkalan PSDKP Tual
Revisi ke - 3	22 Februari 2023	Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual serta untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2023
Revisi ke - 4	14 April 2023	Rekomposisi AA di lakukan karena adanya Tambahan Automatic Adjustment Ditjen PSDKP sebesar Rp2.163.275.000,00 akibat pemenuhan atas dukungan kegiatan Revitalisasi Tambak Udang di Kebumen pada unit kerja Ditjen Budidaya KKP serta adanya perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA pada semua satker
Revisi ke - 5	5 Mei 2023	1. Pergeseran anggaran antar satker; 2. Pergeseran anggaran antar KRO; 3. Ralat Administrasi; 4. Perubahan volume RO; 5. Revisi Administrasi;

Revisi DIPA ke-	Tanggal Revisi DIPA	Pertimbangan Revisi DIPA
Revisi ke - 6	19 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Pergeseran Anggaran POKMASWAS dari UPT Pangkalan PSDKP Biak ke UPT Pangkalan PSDKP Tual. b. Ralat Administrasi hari OPS Speedboat dr ke 36 Hari ke 32 Hari. c. Pengurangan volume output perangkat pengolah data dari 18 unit menjadi 12 unit. d. Perpindahan antar KRO dari sisa belanja perangkat pengolah data ke layanan prasarana internal.
Revisi ke - 7	29 Agustus 2023	Pemenuhan Belanja Pegawai P3K
Revisi ke - 8	16 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Pergeseran anggaran dari Pangkalan PSDKP Tual ke Setditjen PSDKP bersumber dari sisa kontrak pada pemeliharaan dan perawatan Kapal Pengawas serta sisa Belanja pada perangkat pengolah data dengan total Rp. 5.198.000 dan potensi sisa belanja gaji pegawai Rp.250.000.000 dalam rangka mendukung penyelesaian Multi Years Contract pada kegiatan Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan yang dibangun. b. Pergeseran anggaran dari Setditjen PSDKP ke Pangkalan PSDKP Tual Rp.45.430.000 sebagai bentuk strategi pengawasan yang bersifat preventif (pencegahan), diperlukan penambahan cakupan jumlah wilayah dan peserta Bimtek Pokmaswas dan Penyadartahuan Masyarakat.
Revisi ke - 9	1 November 2023	Pergeseran Anggaran untuk menambah BBM Kapal Pengawas dan penambahan target operasi.
Revisi ke - 10	1 Desember 2023	Pergeseran Anggaran antar komponen 001 (Belanja Gaji) ke 002 (Belanja Operasional) sebesar Rp. 148.880.000.

Revisi DIPA ke-	Tanggal Revisi DIPA	Pertimbangan Revisi DIPA
Revisi ke - 11	15 Desember 2023	Revisi Pemenuhan belanja operasional perkantoran.
Revisi ke - 12	27 Desember 2023	a. Revisi Pemenuhan belanja operasional perkantoran. b. Pencantuman perubahan RPD dalam halaman III DIPA serta Pemutakhiran data POK.

- **Revisi DIPA ke 01** hanya Revisi Halaman III DIPA meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual serta untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2023.
- **Revisi DIPA ke 02** hanya revisi Buka Blokir Kewenangan DJA untuk Layanan Sarana Internal (Pengadaan kendaraan Roda 4) sebesar Rp.500.000.000 karena untuk pengadaan kendaraan dinas fungsional roda 4 di Pangkalan PSDKP Tual demi menunjang kegiatan Pengawasan di lingkup Pangkalan PSDKP Tual.
- **Revisi DIPA ke 03** hanya Revisi Halaman III DIPA yang meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual serta untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2023.
- **Revisi DIPA ke 04** hanya revisi Rekomposisi Automatic Adjustment (AA) di 2352 (**RO. Unit Usaha Sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya yaitu sebesar 275.315.000**). Rekomposisi AA di lakukan karena adanya Tambahan Automatic Adjustment Ditjen PSDKP sebesar Rp2.163.275.000,00 akibat pemenuhan atas dukungan kegiatan Revitalisasi Tambak Udang di Kebumen pada Unit Kerja Ditjen Budidaya KKP serta adanya perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA pada semua Satker.
- **Revisi DIPA ke 05** meliputi Revisi anggaran:
 1. **Pergeseran anggaran antar satker;**
Pergeseran anggaran dari Stasiun PSDKP Biak ke Pangkalan PSDKP Tual. Pergeseran anggaran sebesar **Rp 54.570.000** dari 2350.QDD.001 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang dibina dalam membantu pengawasan.

2. Pergeseran anggaran antar KRO

Pergeseran anggaran dari RO 2355.CAN.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi ke RO 2355.EBB.951 Layanan Sarana Internal sebesar **Rp8.900.000**;

3. Ralat Administrasi

Perubahan Volume Output Operasional *Speedboat* karena kesalahan input pada saat penyusunan RKA K/L yaitu terinput **36** Hari Operasi seharusnya **32** Hari Operasi.

4. Perubahan volume RO

Penyesuaian volume output pada RO 2355.CAN.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa Pengadaan Pengolah Data sebanyak **18** unit menjadi **12** unit.

5. Revisi Administrasi

Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA pada semua satker;

- **Revisi DIPA ke 06** meliputi Revisi anggaran:
 1. Pergeseran Anggaran POKMASWAS dari Stasiun PSDKP Biak ke Pangkalan PSDKP Tual;
 2. Ralat Administrasi hari OPS Speedboat dr ke 36 hari ke 32 hari;
 3. Pengurangan volume output perangkat pengolah data dari 18 unit menjadi 12 unit;
 4. Perpindahan antar KRO dari sisa belanja perangkat pengolah data ke layanan prasarana internal.
- **Revisi DIPA ke-7** yaitu Revisi terkait Pemenuhan Belanja Pegawai P3K.
- **Revisi DIPA ke-8** meliputi Revisi anggaran:
 1. Pergeseran anggaran dari Pangkalan PSDKP Tual ke Setditjen PSDKP bersumber dari sisa kontrak pada pemeliharaan dan perawatan Kapal Pengawas serta sisa Belanja pada perangkat pengolah data dengan total Rp. 5.198.000 dan potensi sisa belanja gaji pegawai Rp.250.000.000 dalam rangka mendukung penyelesaian *Multi Years Contract* pada kegiatan Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan yang dibangun.
 2. Pergeseran anggaran dari Setditjen PSDKP ke Pangkalan PSDKP Tual Rp. 45.430.000 sebagai bentuk strategi pengawasan yang bersifat preventif (pencegahan), diperlukan penambahan cakupan jumlah wilayah dan peserta Bimtek Pokmaswas dan Penyadartahuan Masyarakat.

- **Revisi DIPA ke-9** merupakan Pergeseran Anggaran untuk menambah BBM Kapal Pengawas dan penambahan target operasi.
- **Revisi DIPA ke-10** merupakan Pergeseran Anggaran antar komponen 001 (Belanja Gaji) ke 002 (Belanja Operasional) sebesar Rp. 148.880.000
- **Revisi DIPA ke-11** merupakan Revisi Pemenuhan belanja operasional perkantoran.
- **Revisi DIPA ke-12** diantaranya :
 1. Revisi Pemenuhan belanja operasional perkantoran;
 2. Pencantuman perubahan RPD dalam halaman III DIPA serta Pemutakhiran data POK.

Realisasi

B.1 Pendapatan

Pendapatan

Rp148,856,018,-

Realisasi Pendapatan untuk periode Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp148.856.018,- atau mencapai 398,44 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp37.360.000. Pendapatan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Tual terdiri dari Penerimaan Negara yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa:

- ✚ Denda Administratif KM. ASPAC-5 sebesar **Rp8,000,000,-** atas jenis pelanggaran membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan dengan nomor NTB: 942021555087 dan nomor NTPN: 35F4B48VV5IHTFNM tanggal 12 Juni 2023;
- ✚ Denda Administratif KM. CANCER-78 sebesar **Rp47,520,000,-** atas jenis pelanggaran memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memenuhi ketentuan Perizinan berusaha dengan nomor NTB: 000068634756 dan nomor NTPN: 84BAC1JNFLRI4K1B tanggal 13 Juni 2023;
- ✚ Lelang dari Penjualan Peralatan dan Mesin yang meliputi fasilitas perkantoran sesuai Risalah Lelang nomor 75/80/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebesar **Rp7,500.000,-** dengan nomor NTB: 000000254955 dan nomor NTPN: 1C49C1JNFLRCN67T tanggal 7 Juni 2023.
- ✚ Lelang dari Penjualan Peralatan dan Mesin yang meliputi Bongkaran Replating Kapal Pengawas sesuai Risalah Lelang nomor 283/76/2023 tanggal 15 Juni 2023 sebesar **Rp33,333.333,-** dengan nomor NTB: 169582440640 dan nomor NTPN: 5DC7048VV5IUTIK8 tanggal 21 Juni 2023.
- ✚ Denda Keterlambatan sebesar **Rp2,444,685,-** atas Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebanyak 3 (tiga) unit Laptop Travelmate sesuai nilai kontrak yaitu Rp42,400,000,-

- ✚ Denda Administratif KM. CINTA BAHARI 10 sebesar **Rp15,000,000,-** atas jenis pelanggaran membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan dengan nomor NTB: 000000154177 dan nomor NTPN: 949A92G4VGK81BUG tanggal 28 Agustus 2023;
- ✚ Denda Keterlambatan selama 2 hari yaitu sebesar **Rp33,000,-** berdasarkan perhitungan 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atas Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebanyak 1 (satu) unit PC (Personal Computer) Kapal Pengawas Hiu Macan 06 sesuai nilai kontrak yaitu Rp16,500,000,-.
- ✚ Denda Administratif KM. ASPAC-6 sebesar **Rp20,000,000,-** atas jenis pelanggaran membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan dengan nomor NTB: 922539670568, nomor NTPN: CF36661QUR0QLB53 dan tanggal bayar 3 Oktober 2023;
- ✚ Denda Administratif KM. JAYA SAMUDERA sebesar **Rp11,025,000,-** atas jenis pelanggaran memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memenuhi ketentuan Perizinan berusaha dengan nomor NTB: 299771844804, nomor NTPN: 5990F1JNFMATVD45 dan tanggal bayar 29 November 2023;
- ✚ Denda Administratif KM. SUDIR JAYA sebesar **Rp4,000,000,-** atas jenis pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Daftar *CITES* dengan nomor NTB: 231222823716, nomor NTPN: B9C0B1JNFMMDMIVDV dan tanggal bayar 22 Desember 2023;

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi
Pendapatan*

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		40.833.333	
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		2.477.685	
Pendapatan Denda Lainnya	37.360.000	105.545.000	282,51%
Jumlah	37.360.000	148.856.018	398,44%

Realisasi
Belanja
Negara

B.2 Belanja

Rp54.283.587.512,-

Realisasi Belanja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual pada Tahun 2023 adalah sebesar 54.283.587.512 atau 99,80% dari anggaran belanja sebesar Rp54.389.879.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	10.737.188.000	10.737.164.730	100,00
Belanja Barang	42.864.889.000	42.758.635.369	99,75
Belanja Modal	787.802.000	787.787.413	100,00
Belanja Bantuan Sosial			-
Total Belanja Kotor	54.389.879.000	54.283.587.512	99,80
Pengembalian			-
Jumlah	54.389.879.000	54.283.587.512	99,80

Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 22,74%. Hal ini disebabkan karena pada pagu anggaran belanja barang TA 2023 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar Rp42.864.889.000,- dibandingkan dengan pagu anggaran belanja barang TA 2022 yaitu sebesar Rp25,961,373,000,-.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	10.737.164.730	10.462.631.859	2,62
Belanja Barang	42.758.635.369	25.959.172.545	64,71
Belanja Modal	787.787.413	7.804.693.986	(89,91)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	54.283.587.512	44.226.498.390	22,74

B.3 Belanja Pegawai

Belanja
Pegawai

Rp10.737.164.730,-

Realisasi Belanja Pegawai Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing - masing sebesar Rp10.737.164.730,- dan Rp10.462.631.859,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS (PPNPN).

Realisasi belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,62 persen dari TA 2022. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 4 Pegawai. Realisasi belanja Pegawai Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk pegawai Sebanyak 91 orang yang terdiri dari Golongan II sebanyak 22 Orang dan Golongan III sebanyak 67 Orang dan Golongan IV sebanyak 2 Orang. Rincian anggaran dan realisasi belanja Pegawai TA 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.382.576.480	5.334.483.859	0,90
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	83.211.250	-	100,00
Belanja Lembur	45.911.000	17.883.000	156,73
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus	5.225.466.000	5.110.265.000	2,25
Jumlah Belanja Kotor	10.737.164.730	10.462.811.942	2,62
Pengembalian Belanja Pegawai	-	(180.083)	
Jumlah Belanja	10.737.164.730	10.462.631.859	2,62

B.4 Belanja Barang

*Belanja
Barang
Rp42.758.635.
369,-*

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp42.758.635.369,- dan Rp25.959.172.545,-. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan signifikan yaitu sebesar 64,71 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan karena terdapat penambahan pagu anggaran untuk hari operasi kapal Pengawas dan hanya sebagian kecil yang dikenakan *Automatic Adjustment (AA)* dalam pengelolaan pagu belanja barang TA.2023 bila dibandingkan dengan TA.2022.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	3.087.366.141	2.832.465.071	9,00
Belanja Barang Non Operasional	29.975.190.462	15.002.961.647	99,80
Belanja Barang Persediaan	393.353.648	237.650.431	65,52
Belanja Jasa	1.466.184.141	915.222.108	60,20
Belanja Pemeliharaan	3.998.006.450	4.798.318.256	(16,68)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.838.534.527	2.172.555.032	76,68
Jumlah Belanja Kotor	42.758.635.369	25.959.172.545	64,71
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	42.758.635.369	25.959.172.545	64,71

- Belanja Barang Operasional pada Pangkalan Pengawasan SDKP Tual antara lain seperti belanja keperluan perkantoran, penambah daya tahan tubuh, pengiriman surat dinas ke kantor pusat, honor

operasional Satker dan belanja barang operasional lainnya.

- Belanja barang Non Operasional antara lain seperti Belanja Bahan untuk Uang Makan Awak Kapal Pengawas, konsumsi kegiatan seperti kegiatan penyidikan, Uang Makan ABK, Uang Jaga Barang Bukti, Biaya Perpanjangan STNK dan Honor output kegiatan. Dimana penetapan harga dan besaran nilai rupiah pada RAK-KL Pangkalan Pengawasan SDKP Tual belum memiliki dasar hukum pembayaran berupa SBML dari Kementerian Keuangan tetapi masih menggunakan penetapan harga sendiri.
- Belanja Barang Persediaan pada Pangkalan Pengawasan SDKP Tual antara lain seperti Belanja Persediaan Bahan Bakar, Air Bersih, pelumas dan obat-obatan untuk Kapal Pengawas, *Speedboat*, *Rigit Inflatable Boat* dan *Rubber Boat*, Persediaan Alat Tulis Kantor, *Computer Supply*, dan penjilidan, pengadaan SLO, Keperluan kantor seperti Alat Rumah Tangga, Air Minum, Alat Kebersihan dan belanja barang persediaan lainnya.
- Belanja jasa pada Pangkalan Pengawasan SDKP Tual antara lain seperti Belanja Langganan Listrik, Telepon dan Air, Belanja Sewa, Honor Narasumber kegiatan, Ongkos angkut BBM Kapal Pengawas dan Belanja Jasa Lainnya.
- Belanja pemeliharaan pada Pangkalan Pengawasan SDKP Tual meliputi : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, contohnya *Docking* Kapal Pengawas, Perbaikan Darurat dan Rutin Kapal Pengawas, Perbaikan Rutin *Speedboat*, *Rigit Inflatable Boat* dan *Rubber Boat*, Pemeliharaan Komputer, Laptop, AC, Genset, Kendaraan Dinas, Inventaris Kantor dan lain-lain; dan pemeliharaan gedung dan bangunan.
- Belanja perjalanan dinas dalam negeri pada Pangkalan Pengawasan SDKP Tual meliputi : Perjalanan Dinas dalam rangka Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan, Transpor lokal untuk kegiatan pengawasan Sumber daya kelautan (SDK) dan Sumber daya perikanan (SDP) diantaranya pengawasan Destuctive Fishing, Pengawasan Ekspor Impor dan pengawasan SDP dan SDK lainnya, Transport lokal dan perjalanan dinas yang terkait dengan administrasi dan keuangan dan belanja perjalanan dinas dalam negeri lainnya.

B.5 Belanja Modal

**Belanja
Modal**
Rp787.787.413,-

Realisasi Belanja Modal Pangkalan Pengawasan SDKP Tual TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp787.787.413,- dan Rp7.804.693.986,- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA

2023 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 89,91 persen bila dibandingkan TA 2022 dikarenakan tidak ada pembangunan fisik dan hanya terdapat pembelian peralatan dan mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA. 2023	REALISASI TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	787.787.413	7.303.674.918	(89,21)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		226.576.500	(100,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		274.442.568	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	787.787.413	7.804.693.986	(89,91)
Pengembalian			0,00
Jumlah Belanja	787.787.413	7.804.693.986	(89,91)

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA.2023 dan TA.2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2023 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2020	REALISASI TA. 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	-
Jumlah Belanja	0	0	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pangkalan Pengawasan SDKP Tual TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp787.787.413,- dan Rp7.303.674.918,-. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2023 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 89,21 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022, hal ini disebabkan karena pada TA 2022 terdapat pekerjaan *Top Overhaul* KP Hiu Macan 06.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	787.787.413	967.572.030	-18,58
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	6.336.102.888	100,00
Jumlah Belanja Kotor	787.787.413	7.303.674.918	-89,21
Jumlah Belanja	787.787.413	7.303.674.918	-89,21

- Berikut rincian transaksi pembelian peralatan dan mesin senilai Rp787.787.413,- adalah sebagai berikut:

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Nilai (Rp)	Ket
1	3.02.01.02.003	Mini Bus (Toyota Innova)	1	413.000.000	
2	3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	2	13.800.000	
3	3.05.02.03.004	Mesin Cuci Polytron	1	4.606.500	
4	3.05.02.04.001	Lemari Es Polytron	1	3.385.500	
5	3.06.01.01.036	Microphone/Wireless MIC	1	3.900.000	
6	3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply	1	26.020.000	
7	3.06.01.02.168	Video Wall 49 Inch 4 Panel	1	135.000.000	
8	3.06.01.02.999	Peralatan Studio Video	1	7.400.000	
9	3.08.01.12.025	Stabilizer Matsuyama	1	3.338.350	
10	3.08.01.14.004	Freezer	1	5.550.000	
11	3.08.06.02.046	Air Purlier	2	5.536.150	
12	3.09.04.02.031	Kamera Digital Sony-Alpha	1	21.250.000	
13	3.10.01.02.001	Axioo MyPC One Pro K5	1	16.500.000	
14	3.10.01.02.002	Lap Top Acer Travelmate	4	56.148.075	
15	3.10.02.03.003	Printer HP	7	24.500.000	
16	3.10.02.03.004	Scanner Epson	2	17.000.000	
17	3.15.03.03.001	Alat Selam Seet	2	30.852.838	
JUMLAH				787.787.413	

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Pangkalan Pengawasan SDKP Tual TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp226,576,500,-. Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami penurunan sebesar (100) persen dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan karena tidak terdapatnya pekerjaan pembangunan fisik selama tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2023	REALISASI TA.2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	226.576.500	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	0	226.576.500	-100,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	-
Jumlah Belanja	0	226.576.500	-100,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp274.442.568,-. Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 100 persen jika dibandingkan dengan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan karena tidak terdapatnya pekerjaan pembangunan fisik selama tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2023	REALISASI TA. 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	-
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	-
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan	0	14.874.000	100,00
Belanja Modal Jaringan	0	125.468.568	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	134.100.000	100,00
Jumlah Belanja Kotor	0	274.442.568	(100,00)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	0	274.442.568	(100,00)

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

***Belanja
Bantuan
Sosial Rp0,-***

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Kas di bendahara pengeluaran terdiri dari UP sebesar Rp0 dan TUP sebesar Rp0. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022

Keterangan	TA.2022	TA. 2021
Saldo UP	-	-
Kwitansi UP belum di SPJ-kan	-	-
Selisih pembukuan UP	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0,-*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas
Rp0,-*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 31 Desember Tahun 2023 dan per tanggal 31 Desember Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Piutang
Bukan Pajak
Rp16,387,650*

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak Pangkalan PSDKP Tual per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp16,387,650,- dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Berikut

Perbandingannya:

Perbandingan Rincian Piutang PNBP TA 2023 dan 2022

Uraian	TH 2023	TH 2022
Piutang Bukan Pajak	16.387.650	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	16.387.650	-

*Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0,-*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian
Lancar TPA
Rp0,-*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Lancar
Rp0,-*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp0,-*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

C.10 Persediaan

Persediaan Rp663.464.596,-

Nilai Persediaan UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 663.464.596 dan Rp 347.622.190. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Mutasi Persediaan per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Persediaan per 1 Januari 2023		347.622.190
Mutasi Tambah		
Jumlah Pembelian	1.061.187.109	
Transfer Masuk Persediaan	-	
Jumlah Mutasi Tambah		1.061.187.109
Mutasi Kurang		
Beban Persediaan Konsumsi	380.275.925	
Beban Persediaan Suku Cadang	365.068.778	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	
Jumlah Mutasi Kurang		(745.344.703)
Saldo per 31 Desember 2023		663.464.596

Rincian Mutasi Persediaan barang konsumsi per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Persediaan per 1 Januari 2023		38.264.937
Mutasi Tambah		
Jumlah Pembelian	393.353.648	
Transfer Masuk Persediaan		
Jumlah Mutasi Tambah		393.353.648
Mutasi Kurang		
Beban Persediaan Konsumsi	380.275.925	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	
Jumlah Mutasi Kurang		(380.275.925)
Saldo per 31 Desember 2023		51.342.660

Rincian Mutasi Persediaan suku cadang per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Persediaan per 1 Januari 2023		309.357.253
Mutasi Tambah		
Jumlah Pembelian	667.833.461	
Transfer Masuk Persediaan	-	
Jumlah Mutasi Tambah		667.833.461
Mutasi Kurang		
Beban Persediaan Suku Cadang	365.068.778	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		
Jumlah Mutasi Kurang		(365.068.778)
Saldo per 31 Desember 2023		612.121.936

Rincian Persediaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA. 2023 dan TA. 2022

Jenis	TA. 2023	TA. 2022
Barang Konsumsi	51.341.660	38.264.937
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	612.121.936	309.357.253
Barang Persediaan Bahan Baku	-	-
Jumlah	663.463.596	347.622.190

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Rincian persediaan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Berupa :

- Barang Konsumsi (kode 117111) senilai Rp51.342.660- yang terdiri dari:

NO	KODE BARANG	URAIAN KODE BARANG	FISIK	NILAI
	1010301001	ALAT TULIS		
1	000273	PENSIL 2B HMC 06 (pcs)	17	77.9
2	000312	Pena Deboz DB-GP700 HIU 14	2	8.3
3	000325	PENSIL 2B STEADLER HIU 14 (PCS)	8	49.3
4	000373	PENSIL 2B	5	9.3
5	000374	SPIDOL WB	3	33.7
6	000376	PENA BALL LINER BIRU	6	135.1
7	000379	PENA BALL LINER HITAM	14	315.4
8	000394	PENA SNOWMAN V5 HMC 06	2	7.0
9	000395	PENA BALL LINER HMC 06	1	20.0
10	000400	PENA BALL LINER KAIMANA	1	20.0
11	000401	SPIDOL WB KAIMANA	1	20.0
12	000409	PENA JOYKO GEL GP-2 HMC 06	8	34.6
13	000413	Balpoint Snowman / Standard HIU 14	2	5.0
14	000461	BALL LINER HIU 14	12	200.0
15	000503	SPIDOL PERMANEN TUAL	1	11.2
16	000504	STABILO WARNA WARNI TUAL	3	33.8
17	000527	PENA ARTLINE HMC 06	10	23.3
18	000543	PILOT BALLPEN FRIXI HIU 14	6	210.0
	1010301003	PENJEPIT KERTAS		
19	000440	BINDER CLIPS NO. 105	8	54.0
20	000503	BINDER CLIP NO. 111 HMC6	2	14.0
21	000550	BINDER CLIP NO 155 KAIMANA	1	12.0
22	000565	PAPER CLIP HMC 06	2	10.0
	1010301004	PENGHAPUS/KOREKTOR		
23	000097	PENGHAPUS PENSIL H14	10	166.6
24	000124	CORRECTION PLUIT KAIMANA	1	44.0
	1010301006	ORDNER DAN MAP		
25	000300	MAP PANGKALAN PSDKP TUAL	270	7.604.9
26	000331	MAP BATIK RAJA AMPAT	3	23.7
27	000337	MAP MERAH DIAMOND HMC 06	18	54.0
28	000342	MAP SURAT COKLAT (27 X 37)	59	489.7
29	000353	MAP KECIL COKLAT RAJA AMPAT	31	62.0
30	000354	MAP BESAR COKLAT RAJA AMPAT	36	93.6
31	000375	CETAK MAP UKURAN F4	250	4.181.2
32	000383	BLANKO PERSURATAN MAP COKLAT TUAL	350	9.858.2
33	000388	STOP MAP FOLIO HIU 14	32	32.0
34	000389	MAP PLASTIK HIU 14	6	25.0
	1010301008	CUTTER (ALAT TULIS KANTOR)		
35	000021	ISI CUTTER	1	16.9
	1010301010	ALAT PEREKAT		
36	000019	DOUBLE TIP BESAR	3	50.7
37	000035	Plakban Bening Besar	3	50.7
38	000036	Plakban Hitam Besar	1	20.2
39	000185	DOUBLE TIP SEDANG	3	27.0

NO	KODE BARANG	URAIAN KODE BARANG	FISIK	NILAI
40	000253	DOUBLE TIP KECIL	3	16.899
41	000322	GLUE STICK LEM HIU 14	2	275.000
42	000398	LAKBAN BENING 2 HMC 06	2	30.000
43	000423	NACHI TAPE COKLAT 48 MM KAIMANA	1	16.500
44	000426	NACHI TAPE DOUBLE 48-24 KAIMANA	1	8.000
45	000430	LAKBAN HITAM RAJA AMPAT	1	30.000
46	000453	LEM BANTEX GLUE STICK 35 GR KAIMANA	1	21.000
47	000459	LEM BANTEX GLUE STICK 21 GR KAIMANA	1	15.000
48	000465	LAKBAN COKLAT TUAL	6	54.078
	1010301012	STAPLES		
49	000004	STEPLES BESAR TUAL	4	383.060
50	000005	STEPLES KECIL TUAL	3	84.498
	1010301013	ISI STAPLES		
51	000004	ISI STEPLES KECIL TUAL	4	22.532
52	000005	ISI STEPLES BESAR TUAL	6	54.078
	1010301999	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA		
53	000281	GUNTING	4	99.144
54	000299	MAGNETTO BUTTON H14	1	15.000
55	000359	BANTEX CLIP BOARD KAIMANA	4	196.000
56	000360	ISI HEKTER NO 3 HIU 14	1	10.000
57	000380	DSCT 3M MOUNTING TA HIU 14	2	251.000
58	000383	SPIDOL BOARD MARKER RAJA AMPAT	5	29.169
59	000384	BUKU KUITANSI KAIMANA'	1	49.000
	1010302001	KERTAS HVS		
60	000011	Kertas F4	6	437.687
61	000204	KERTAS A4	7	473.193
62	000212	KERTAS A4 KAIMANA	3	168.000
63	000218	KERTAS A4 HIU 14	2	128.000
64	000220	KERTAS A4 HMC 06	5	285.000
65	000231	KERTAS F4 RAJA AMPAT	7	518.000
66	000232	KERTAS A4 RAJA AMPAT	8	576.000
67	000235	KERTAS F4 KAIMANA	2	130.000
68	000254	KERTAS A4 70 GR TUAL	5	326.770
	1010302002	BERBAGAI KERTAS		
69	000198	KERTAS STIKER HIU 14	1	65.000
	1010302004	AMPLOP		
70	000272	AMPLOP COKLAT A3 H14	2	5.000
71	000298	AMPLOP COKLAT TALI EXECITIVE HIU 14	18	37.502
	1010303999	BAHAN CETAK LAINNYA		
72	000006	KUITANSI BESAR HMC 6	10	100.000
	1010304004	TINTA/TONER PRINTER		
73	000409	EPSON INK T6641 BLACK HIU 14	1	100.000
74	000410	EPSON INK T6642 CYAN HIU 14	2	200.000
75	000411	EPSON INK T6643 MAGENTA HIU 14	3	300.000
76	000412	EPSON INK T6644 YELLOW HIU 14	2	200.000
77	000455	TINTA BOTOL EPSON SAUMLAKI	3	450.000
78	000471	REFILL CANON BLACK KAIMANA	1	80.000
79	000551	TINTA EPSON 790 BLACK	2	337.996
80	000552	TINTA EPSON 790 CYAN	2	337.996

NO	KODE BARANG	URAIAN KODE BARANG	FISIK	NILAI
81	000553	TINTA EPSON 790 YELLOW	2	337.99€
82	000554	TINTA EPSON 790 MAGENTA	2	337.99€
83	000561	TINTA HITAM CANON EPRINT HMC6	1	85.00€
84	000573	TINTA PRINTER EPSON 001 CYAN	2	337.99€
85	000574	TINTA PRINTER EPSON 001 BLACK	2	337.99€
86	000575	TINTA PRINTER EPSON 001 YELLOW	2	337.99€
87	000576	TINTA PRINTER EPSON 001 MAGENTA	2	337.99€
88	000601	TINTA EPSON 664 RAJA AMPAT	1	570.00€
89	000647	TINTA CANNON EPRINT WARNA HMC 6	1	85.00€
90	000649	TINTA PRINTER EPSON 003 BLACK TUAL	2	337.99€
91	000650	TINTA PRINTER EPSON 003 CYAN TUAL	2	337.99€
92	000652	TINTA PRINTER EPSON 003 YELLOW	2	337.99€
93	000653	TINTA PRINTER EPSON 003 MAGENTA	1	168.99€
94	000654	TINTA PRINTER EPSON 003 RAJA AMPAT	1	570.00€
95	000655	TINTA EPSON HITAM RAJA AMPAT	1	183.75€
	1010304999	BAHAN KOMPUTER LAINNYA		
96	000245	CATRIDGE CANON BLACK 810 HMC 6	1	250.00€
97	000252	CATRIDGE CANON WARNA 811 HMC 6	1	305.00€
98	000283	HDMI DONGLE HIU 14	1	245.00€
99	000295	ADAPTER LAPTOP UNIVERSAL HIU 14	1	125.00€
100	000297	FLASH DISK SANDISK 64 GB HIU 14	1	125.00€
	1010306010	BATU BATERAI		
101	000139	BATERAI KOTAK ABC HIU 14	2	40.00€
	1010307999	PERLENGKAPAN DINAS LAINNYA		
102	000012	FORM BERANGKAT ANGKUT	33	2.326.50€
103	000013	FORM LHVPI	46	3.450.00€
104	000014	FORM HPUPI	50	3.750.00€
105	000015	BUKU LAPOR PANGKALAN	100	5.000.00€
JUMLAH			1.597	51.342.66€

Suku Cadang (kode 117114) senilai Rp 612.121.936,- terdiri dari:

NO	KODE BARANG	URAIAN KODE BARANG	FISIK	NILAI
	1010201003	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR		
1	000074	'PERKINS 1006 TG 2AM OIL FILTER	50	12.714.210
2	000078	'PERKINS 1006 TG 2AM FUEL FILTER	30	26.806.500
3	000079	'PERKINS 4.4 TGM FUEL FILTER	41	53.357.700
4	000080	'PERKINS 4.4 TGM OIL FILTER	48	12.732.000
5	000081	'PERKINS 4.4 TGM RACOR FILTER	42	9.840.000
6	000104	ALB SPARK PLUG BKR6E	12	588.000
7	000107	ALB FILTER ASSY, OIL	3	717.750
8	000112	ALB FILTER, WATER STBD '2	1	41.818
9	000125	RIB PLUG, SPARK (LKR6E)	4	473.444
10	000127	RIB FILTER FUEL 15412-92J00-000	2	359.460
11	000128	RIB FILTER ASSY, OIL	1	180.631
12	000129	RIB IMPELLER, WATER PUMP	2	845.946
13	000132	RIB ANODE MAGNESIUM 55312-94910-000	3	1.243.242
14	000133	RIB ANODE, PROTECTION 55321-93J01-000	4	621.620
15	000134	RIB ANODE, PROTECTION 55321-87J01-000	6	408.108
16	000143	PERKINS 4.4 TGM SENSOR OIL	1	440.000
17	000145	'CUMMINS KTA 50 M2 OIL FILTER	40	10.760.000
18	000146	'CUMMINS KTA 50 M2 COOLANT FILTER	18	6.058.800
19	000147	'CUMMINS KTA 50 M2 FUEL FILTER (WIX 33144)	13	2.645.500
20	000148	'MAN D 2842 LE410 FUEL FILTER	40	36.600.000
21	000150	'MAN D 2842 LE410 RACOR FILTER	46	14.216.000
22	000151	'MAN D 2842 LE410 OIL FILTER	32	28.800.000
23	000152	'MAN D 2842 LE410 SENSOR COOL PRESS AFT WATERPUMP	1	7.958.500
24	000167	NAPOLEON 49 FUEL FILTER	1	1.570.000
25	000178	CUMMINS KTA 50 M2 FUEL FILTER (2018)	12	4.392.000
26	000182	PERKINS 1006 TG 2AM AIR FILTER SEKUNDER (2019)	8	2.640.000
27	000184	MAN D 2842 LE410 IMPELLER SEA WATER PUMP	3	22.275.000
28	000186	MAN D 2842 LE410 GEAR BOX FILTER (2018)	5	18.700.000
29	000187	PERKINS 4.4 TGM RACOR FILTER (2019)	3	528.000
30	000188	PERKINS 4.4 TGM RACOR FILTER (2018)	10	1.705.000
31	000193	PERKINS 4.4 TGM AIR FILTER 26510342	16	10.234.000
32	000194	PERKINS 4.4 TGM IMPELLER (2018)	3	1.551.000
33	000195	PERKINS 4.4 TGM WARE PLATE SEA WATER PUMP (2018)	5	2.475.000
34	000196	PERKINS 4.4 TGM CAM DG (2018)	1	902.000
35	000197	PERKINS 404D-22 FUEL FILTER (2019)	13	858.000
36	000198	PERKINS 404D-22 OIL FILTER (2019)	12	990.000
37	000199	PERKINS 404D-22 AIR FILTER (2018)	2	1.100.000
38	000200	PERKINS 404D-22 AIR FILTER (2019)	5	2.475.000
39	000201	CUMMINS KTA 50 M2 AIR FILTER (2018)	8	19.720.000
40	000202	CUMMINS KTA 50 M2 RACOR FILTER (2018)	64	16.966.400
41	000203	CUMMINS KTA 50 M2 OIL FILTER BY PASS (2018)	20	4.338.400
42	000204	ALB PLUG	2	103.400
43	000213	ALB O RING SET	2	206.800
44	000217	RIB PLUG DRAIN 55128-93J10-000	3	253.575
45	000218	RIB PLUG DRAIN 55128-93L00-000	4	462.000
46	000220	RIB GASKET, 9.5 X 16.5 X 2	4	73.500
47	000285	CABLE ASSY, THROTTLE (63610-92L00-000) RAJA AMPAT	2	298.000
48	000286	IMPELLER, WATER PUMP (17461-96312-000) RAJA AMPAT	1	229.000
49	000287	HOSE FUEL (65700-87DL2-000) RAJA AMPAT	1	1.236.675
50	000288	PROPELLER (DT 40) (58100-88LA0-019) RAJA AMPAT	1	2.660.000

NO	KODE BARANG	URAIAN KODE BARANG	FISIK	NILAI
51	000289	FILTER ASSY FUEL (15410-94401-000) RAJA AMPAT	1	197.000
52	000310	RIB ELEMNT SET	4	1.135.136
53	000311	PERKINS 1006 RACOR FILTER 2010	62	15.879.174
54	000312	PERKINS 1006 FUEL FILTER 26560143	9	3.309.318
55	000313	PERKINS 1006 FUEL FILTER 26560145	34	24.971.958
56	000314	PERKINS 1006 AIR FILTER PRIMER/AIR CLEANER OUT 26510342	25	16.558.515
57	000325	NAPOLEON 49 RACOR BBM	4	600.000
58	000340	PERKINS 4.4 TGM AIR FILTER 26510343	4	1.450.000
59	000343	PERKINS 4.4 TGM SENSOR OLI (KUS-K-E21103) 0-10 BAR HIU 14	8	5.772.000
60	000347	PERKINS 1006 TG 2AM VDO SENSOR OILO-5 BAR HMC 6	5	5.272.500
61	000369	JETS OIL FILTER	8	1.372.000
62	000371	MAN AIR FILTER 51.08301-0016	6	28.240.740
63	000372	MAN PIN 51.91301-0103	4	2.760.000
64	000375	PERKINS 4.4 TGM V-BELT 2614B554	4	4.218.000
65	000376	PERKINS 4.4 TGM THERMOSTAT 4133L508	1	1.554.000
66	000377	PERKINS 4.4 TGM SEAL THERMOSTAT HOUSING	10	8.325.000
67	000382	MAN CAM MAN ELEKTRIK	2	16.145.920
68	000383	MAN WEAR PLATE	4	15.589.920
69	000385	RIB BUSH, DRIVE SHAF	2	654.954
70	000386	RIB RING, SNAP	2	99.100
71	000388	RIB SEAL FUEL FILTER	2	137.838
72	000389	RIB O RING 31123-94910-000	2	190.990
73	000390	RIB SPRING 31135-94900-000	10	369.370
74	000391	RIB O RING 48585-95E00-000	2	58.558
75	000396	CUMMINS KTA 50 M2 MOTOR STARTING	1	53.653.710
76	000397	JETS PLUG, SPARK (CR9EB)	20	1.010.000
77	000403	NAPOLEON 42 LINER CYLINDER	4	27.088.080
78	000404	NAPOLEON 42 INTAKE VALVE	4	7.908.000
79	000405	NAPOLEON 49 RING SET 879288074	4	20.248.176
JUMLAH			899	612.121.936

- Nilai Persediaan yang tercantum dalam laporan Neraca persediaan adalah nilai persediaan yang terletak di Pangkalan PSDKP Tual dan termasuk dengan nilai persediaan pada Kapal Pengawas, Satwas dan Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Tual TA. 2023.

Tagihan
TP/TGR
Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi

adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0,-*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0,-*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Tanah
Rp17,914,787,
000,-*

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki UPT Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tual 31 Desember Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 17.914.787.000,- dan Rp 17.914.787.000. Tidak Ada Perubahan nilai mutasi aset tetap Tanah sampai pada tanggal pelaporan.

Rincian mutasi nilai asset tanah di jelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	17.914.787.000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	17.914.787.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	17.914.787.000

*Peralatan dan
Mesin
Rp82.660.082.020,-*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual TA. 2023 dan TA. 2022 masing - masing adalah Rp82.660.082.020,- dan Rp85,575,246,691. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Desember 2022 **85.575.246.691**

Mutasi tambah:

Pembelian / Peralatan Mesin 787.787.413

Transfer Masuk 5.800.000

Transaksi Reklas Masuk 500.181.448

Mutasi kurang:

Penghentian Penggunaan 3.708.752.084

Transaksi Reklas Keluar 500.181.448

Transaksi Reklas Aset Tetap ke Aset lainnya

Saldo per 31 Desember 2023 **82.660.082.020**

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023 -69.975.993.037

Nilai Buku per 31 Desember 2023 **12.684.088.983**

- Mutasi transaksi Penambahan peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Barang	Nama Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)	Ket
1	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 O	1	413.000.000	
2	3050105048	LCD Projector/Infocus	1	6.900.000	
3	3050105048	LCD Projector/Infocus	1	6.900.000	
4	3050203004	Mesin Cuci	1	4.606.500	
5	3050204001	Lemari Es	1	3.385.500	
6	3050204999	Alat Pendingin Lainnya	1	5.550.000	
7	3060101036	Microphone/Wireless MIC	1	3.900.000	
8	3060101048	Uninterruptible Power Supp	1	26.020.000	
9	3060102128	Camera Digital	1	21.250.000	
10	3060102168	Video Wall	1	135.000.000	
11	3060102999	Peralatan Studio Video Dan	1	7.400.000	
12	3060207005	Finger Printer Time and Atta	1	1.450.000	
13	3060207005	Finger Printer Time and Atta	1	1.450.000	
14	3060207005	Finger Printer Time and Atta	1	1.450.000	
15	3060207005	Finger Printer Time and Atta	1	1.450.000	

No	Kode Barang	Nama Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)	Ket
16	3080112025	Stabilizer	1	3.338.350	
17	3080602046	Air Purlier	1	2.768.075	
18	3080602046	Air Purlier	1	2.768.075	
19	3150303001	Alat Selam Seet	1	28.741.500	
20	3150303001	Alat Selam Seet	1	2.111.338	
21	3100102001	P.C Unit	1	16.500.000	
22	3100102002	Lap Top	1	14.133.000	
23	3100102002	Lap Top	1	14.133.000	
24	3100102002	Lap Top	1	14.134.000	
25	3100102002	Lap Top	1	13.748.075	
26	3100203003	Printer (Peralatan Person	1	3.500.000	
27	3100203003	Printer (Peralatan Person	1	3.500.000	
28	3100203003	Printer (Peralatan Person	1	3.500.000	
29	3100203003	Printer (Peralatan Person	1	3.500.000	
30	3100203003	Printer (Peralatan Person	1	3.500.000	
31	3100203003	Printer (Peralatan Person	1	3.500.000	
32	3100203003	Printer (Peralatan Person	1	3.500.000	
33	3100203004	Scanner (Peralatan Perso	1	8.500.000	
34	3100203004	Scanner (Peralatan Perso	1	8.500.000	
TOTAL MUTASI MASUK			34	793.587.413	

Terdapat Reklasifikasi Barang Keluar yaitu untuk mengubah kodefikasi barang sesuai dengan surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap nomor: B.2020/PSDKPLan.6/PL.710/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023. Berikut rincian Daftar Barang Reklas Keluar dan Reklas masuk Peralatan dan Mesin:

Daftar Barang Reklas Keluar dan Masuk TA 2023

- Mutasi transaksi Pengurangan peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Barang	Nama Barang	Nilai (Rp)	Ket
1				
TOTAL MUTASI KELUAR			0	

- Penghentian Penggunaan

No	Kode Barang	Nama Barang	Nilai (Rp)
1			
TOTAL MUTASI PENGHENTIAN PENGGUNAAN			0

*Gedung dan Bangunan
Rp18,361,988,619,-
,-*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing - masing adalah Rp18,361,988,619 dan Rp18,361,988,619. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	18.361.988.619
Mutasi tambah:	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Kesalahan Input IP	-
Saldo per 31 Desember 2023	18.361.988.619
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(2.337.736.340)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	16.024.252.279

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan dan Irigasi
Rp24,948,642,274,-
-*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp24,948,642,274,- dan Rp24,948,642,274. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal

pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	24.948.642.274
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-
Pengembangan Melalui KDP	-
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	
Koreksi Kesalahan Input IP Irigasi	-
Saldo per 31 Desember 2023	24.948.642.274
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(19.423.586.716)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	5.525.055.558

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp142.680.000,-*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah Rp142.680.000 dan Rp142.680.000. Mutasi transaksi terhadap aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	142.680.000
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2022	142.680.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	142.680.000

Rincian Aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 tidak ada perubahan senilai Rp142.680.000 yang merupakan Aset Tetap Dalam Renovasi. Aset tetap Dalam Renovasi merupakan Pengurukan Lahan kantor dan Mess Wilker Raja Ampat yang hak kepemilikan Tanahnya masih di miliki oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan UPT Pangkalan Pengawasan

*Dalam
Pengerjaan
Rp0*

SDKP Tual TA 2023 dan TA 2022 masing-masing adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	-
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp91.737.316.093,
-
,-)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing - masing adalah (Rp91.737.316.093,-) dan (Rp89.724.465.696,-). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA2023

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	82.660.082.020	69.975.993.037	12.684.088.983
2	Gedung dan Bangunan	18.361.988.619	2.337.736.340	16.024.252.279
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.948.642.274	19.423.586.716	5.525.055.558
4	Aset Tetap Lainnya	142.680.000	0	142.680.000
Akumulasi Penyusutan		126.113.392.913	91.737.316.093	34.376.076.820

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud Rp0

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-Lain Rp14,300,000,-

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah Rp.14.300.000,- dan Rp1,573,695,000,- Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1.573.695.000
Mutasi tambah:	
Aset Tetap yg tdk digunakan dlm operasi pemerintahan	3.708.752.084
Mutasi kurang:	
Penghapusan	(5.268.147.084)
Saldo per 31 Desember 2023	14.300.000

- Mutasi transaksi Penambahan aset lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Barang	Nama Barang	Nilai (Rp)	Ket
TOTAL MUTASI MASUK			0	

- Mutasi transaksi Pengurangan aset lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Barang	Nama Barang	Nilai (Rp)	Ket
	166112			
1	30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	1.320.000,	
2	30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	8.459.000,	
3	30303	ALAT UKUR	145.792.650,	
4	30401	ALAT PENGOLAHAN	119.375.000,	
5	30501	ALAT KANTOR	417.004.000,	
6	30502	ALAT RUMAH TANGGA	1.204.461.770,	
7	30601	ALAT STUDIO	254.749.664,	
8	30602	ALAT KOMUNIKASI	306.110.000,	
9	30603	PERALATAN PEMANCAR	27.960.000,	
10	30701	ALAT KEDOKTERAN	15.565.000,	
11	30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	253.667.000,	
12	30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	4.000.000,	
13	30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1.122.000,	
14	30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	12.405.000,	
15	30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	84.400.000,	
16	31001	KOMPUTER UNIT	729.730.000,	
17	31002	PERALATAN KOMPUTER	31.050.000,	
18	31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	4.191.000,	
19	31503	ALAT SAR	40.150.000,	
20	31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	5.940.000,	
21	31901	PERALATAN OLAH RAGA	41.300.000,	
JUMLAH			Rp 3.708.752.084	

*Akumulasi
Penyusutandan
Amortisasi
AsetLainnya
(Rp14.300,000)*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 31 Desember 2023 dan Periode 31 Desember 2022 masing-masing adalah (Rp14.300.000) dan (Rp1,573,695,000). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Hibah Yang
Belum
Disahkan Rp0*

C.24 Hibah Yang Belum Disahkan

Hibah yang belum disahkan UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Uang Muka
dari KPPN Rp0*

C.25 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. merupakan kewajiban kepada pihak Ketiga, baik pihak pegawai maupun pihak penyedia jasa yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

*Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp57,378,467*

C.28 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp57,378,467,- dan Rp81,475,889,-. merupakan kewajiban kepada pihak Ketiga, baik pihak pegawai maupun pihak penyedia jasa yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai Berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Tagihan listrik Kantor Lingkup Pangkalan PSKDP Tual bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024	30.827.380
2	Uang Makan Bulan Desember 2023 untuk Pegawai yang dibayarkan pada Januari 2024	15.420.000
3	Tagihan Internet kantor Lingkup PSDKP Tual Bulan Desember 2023 yang dibayarkan di bulan Januari 2024	7.138.567
4	Tagihan listrik satwas dan Wilker Lingkup Pangkalan PSKDP Tual bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024	3.312.235
5	Tagihan Air Satwas dan Wilker Lingkup Pangkalan PSKDP Tual bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024	680.285
	Total Beban yang Masih Harus Dibayar	57.378.467

C.29 Ekuitas

Ekuitas
Rp52.913.337.599

Ekuitas UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 31 Desember 2023 dan TA 2022 masing-masing adalah sebesar Rp52.913.337.599 dan Rp58.059.025.189. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP
Rp108,022,6,-
85

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah PNBP Pangkalan PSDKP Tual TA 2023 dan TA 2022 masing-masing adalah sebesar Rp108,022,685,- dan Rp19,150,167,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak	108.022.685	19.150.167	464,08
Jumlah	108.022.685	19.150.167	464,08

Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Laporan Operasional TA 2023 dengan TA 2022 mengalami Kenaikan Signifikan. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut terdiri dari:

- ✚ Denda Administratif KM. ASPAC-5 sebesar **Rp8,000,000,-** atas jenis pelanggaran membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan dengan nomor NTB: 942021555087 dan nomor NTPN: 35F4B48VV5IHTFNM tanggal 12 Juni 2023;
- ✚ Denda Administratif KM. CANCER-78 sebesar **Rp47,520,000,-** atas jenis pelanggaran memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memenuhi ketentuan Perizinan berusaha dengan nomor NTB: 000068634756 dan nomor NTPN: 84BAC1JNFLRI4K1B tanggal 13 Juni 2023;
- ✚ Denda Keterlambatan sebesar **Rp2,444,685,-** atas Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebanyak 3 (tiga) unit Laptop Travelmate sesuai nilai kontrak yaitu Rp42,400,000,-
- ✚ Denda Administratif KM. CINTA BAHARI 10 sebesar **Rp15,000,000,-** atas jenis pelanggaran membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan dengan nomor NTB: 000000154177 dan nomor NTPN: 949A92G4VGK81BUG tanggal 28 Agustus 2023;
- ✚ Denda Keterlambatan selama 2 hari yaitu sebesar **Rp33,000,-** berdasarkan perhitungan 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atas Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebanyak 1 (satu) unit PC (Personal Computer) Kapal Pengawas Hiu Macan 06 sesuai nilai kontrak yaitu Rp16,500,000,-.
- ✚ Denda Administratif KM. ASPAC-6 sebesar **Rp20,000,000,-** atas jenis pelanggaran membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan dengan nomor NTB: 922539670568,

nomor NTPN: CF36661QUR0QLB53 dan tanggal bayar 3 Oktober 2023;

- ✚ Denda Administratif KM. JAYA SAMUDERA sebesar **Rp11,025,000,-** atas jenis pelanggaran memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memenuhi ketentuan Perizinan berusaha dengan nomor NTB: 299771844804, nomor NTPN: 5990F1JNFMATVD45 dan tanggal bayar 29 November 2023;
- ✚ Denda Administratif KM. SUDIR JAYA sebesar **Rp4,000,000,-** atas jenis pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Daftar *CITES* dengan nomor NTB: 231222823716, nomor NTPN: B9C0B1JNFMMDMIVDV dan tanggal bayar 22 Desember 2023;

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak disajikan pada Tabel di bawah ini:

No	Kode Akun	Uraian Akun	Nilai (Rp)	Ket
1	425839	Pendapatan Denda Lainnya	8.000.000	KM. ASPAC-5
2	425839	Pendapatan Denda Lainnya	47.520.000	KM. CANCER-78
3	425811	Denda Keterlambatan Pekerjaan	2.444.685	PENGADAAN LAPTOI
4	425839	Pendapatan Denda Lainnya	15.000.000	KM. CINTA BAHARI 1
5	425811	Denda Keterlambatan Pekerjaan	33.000	PENGADAAN PC
6	425839	Pendapatan Denda Lainnya	20.000.000	KM. ASPAC-6
7	425839	Pendapatan Denda Lainnya	11.025.000	KM. JAYA SAMUDER
8	425839	Pendapatan Denda Lainnya	4.000.000	KM. SUDIR JAYA
JUMLAH			108.022.685	

**Beban
Pegawai**
Rp10,720,865,
730,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Pangkalan PSDKP Tual TA 2023 dan TA 2022 masing-masing adalah sebesar Rp10.720.865.730 dan Rp10.468.917.859. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilaksanakan.

Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	5.365.389.480	5.340.769.859	0,46
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	84.099.250	-	100,00
Beban Lembur	45.911.000	17.883.000	100,00
Beban Tunjangan Khusus PNS	5.133.563.000	5.110.265.000	0,46
Beban Tunjangan Khusus PPPK	91.903.000	-	100,00
Sub Total	10.720.865.730	10.468.917.859	2,41
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah	10.720.865.730	10.468.917.859	2,41

Realisasi belanja Pegawai Pangkalan PSDKP Tual yang terdiri dari PNS dan PPPK yaitu sebanyak 91 pegawai yang terdiri dari Golongan II sebanyak 22 Orang, Golongan III sebanyak 67 Orang dan Golongan IV sebanyak 2 Orang.

Terdapat selisih sebesar Rp6,399,000,- utang pihak ke-3 Beban Pegawai TA 2023 senilai Rp15,420,000,- dan Beban Pegawai TA 2022 senilai Rp21,819,000,-. Hal ini akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Rincian Selisih Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	SELISIH
Uang Makan PNS Desember	14.532.000	21.819.000	7.287.000,00
Uang makan PPPK Desember	888.000	-	-888.000,00
Jumlah	15.420.000	21.819.000	6.399.000

*Beban
Persediaan
Rp380,275,925*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Pangkalan PSDKP Tual TA 2023 dan TA 2022 masing-masing adalah sebesar Rp380,275,925,- dan Rp274,869,390,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	380.275.925	274.869.390	38,35
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	380.275.925	274.869.390	38,35

D.4 Beban Barang dan Jasa

**Beban
Barang dan
Jasa
Rp34,511,042,
322**

Jumlah Beban Barang dan Jasa Pangkalan PSDKP Tual TA 2023 dan TA 2022 masing-masing adalah sebesar Rp34,511,042,322,- dan Rp18,788,412,538,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	2.469.420.307	2.229.936.096	10,74
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	342.574.575	303.544.406	12,86
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	74.623.259	54.131.730	37,85
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	200.748.000	192.318.000	4,38
Beban Barang Operasional Lainnya	0	35.809.500	(100,00)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	9.408.692	16.725.339	(43,75)
Beban Bahan	27.353.634.528	13.856.129.175	97,41
Belanja Honor Output Kegiatan	23.950.000	45.650.000	(47,54)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.597.605.934	1.101.182.472	135,89
Beban Langganan Listrik	715.188.135	487.981.697	46,56
Beban Langganan Telpon	97.942.940	100.908.985	(2,94)
Beban Langganan Air	139.497.070	103.771.138	34,43
Beban Sewa	205.897.985	129.550.000	58,93
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4.832.294	0	100,00
Beban Jasa Profesi	12.200.000	7.000.000	74,29
Beban Jasa Lainnya	263.518.603	117.623.000	124,04
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	6.151.000	(100,00)
Jumlah	34.511.042.322	18.788.412.538	83,68

Terdapat selisih sebesar Rp17,698,422,- utang pihak ke-3 Beban Barang dan Jasa TA 2023 senilai Rp41,958,467,- dan Beban Barang dan Jasa TA 2022 senilai Rp59,656,889,-. Hal ini akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Rincian Selisih Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	SELISIH
Langganan Internet	7.138.567	5.009.000	-2.129.567,00
Langganan Listrik	34.139.615	54.590.889	20.451.274,00
Langganan Air	680.285	57.000	-623.285,00
Jumlah	41.958.467	59.656.889	17.698.422

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp3,695,241,767

Beban Pemeliharaan Pangkalan PSDKP Tual TA 2023 dan TA 2022 masing-masing adalah sebesar Rp3,695,241,767,- dan Rp4,965,515,993,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada beban persediaan bahan Untuk pemeliharaan dan pada beban pemeliharaan gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Periode TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan TA 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	594.249.645	445.049.444	33,52
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.648.971.114	3.861.149.907	(31,39)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	86.952.230	24.152.050	260,02
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	31.252.968	(100,00)
Beban Pemeliharaan Suku Cadang	365.068.778	603.911.624	(39,55)
Jumlah	3.695.241.767	4.965.515.993	(25,58)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas
Rp3,838,534,527

Beban Perjalanan Dinas Pangkalan PSDKP Tual TA 2023 dan TA 2022 masing-masing adalah sebesar Rp3,838,534,527 dan Rp2,172,555,032. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh bertambahnya anggaran perjalanan dinas jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Periode TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	2.986.173.127	1.978.588.775	50,9
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	88.755.000	43.400.000	104,5
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	91.311.800	6.250.000	1.361,0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	672.294.600	144.316.257	365,8
Jumlah	3.838.534.527	2.172.555.032	76,68

**Beban
Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0,-**

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2018.

**Beban
Bantuan
Sosial Rp0,-**

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial UPT Pangkalan Pengawasan SDKP per 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

**Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp6,287,288,3
23**

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Pangkalan PSDKP Tual TA 2023 dan TA 2022 masing-masing adalah sebesar Rp6,287,288,323,- dan Rp3,673,252,025,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Periode TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2023 dan 2022*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.532.285.932	2.296.529.630	53,81
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	399.217.212	197.342.840	102,30
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	13.088.229	10.696.569	22,36
Beban Penyusutan Irigasi	2.315.038.981	1.156.698.489	100,14
Beban Penyusutan Jaringan	27.270.799	11.984.497	127,55
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	387.170		100,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.287.288.323	3.673.252.025	71,16

**Beban
Penyisihan**

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat

Piutang Tak Tertagih Rp49,500 estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pangkalan PSDKP Tual TA 2023 dan TA 2022 masing-masing adalah sebesar Rp49,500,- dan Rp0.

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp40,833,333

D.11 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pangkalan PSDKP Tual TA 2023 dan TA 2022 masing-masing Rp40,833,333 dan (Rp64,626,024). Rincian Kegiatan Non Operasional TA. 2023 dan TA. 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	Rp 40.833.333	Rp 980.000	4067
Beban Kerugian Pelepasan Aset	Rp -	-Rp 65.606.024	-100
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional			
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan			
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	40.833.333	-64.626.024	(163,18)

Pos Luar Biasa Rp0,-

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa Pangkalan PSDKP Tual TA 2023 dan TA 2022 masing-masing adalah Sebesar Rp0 dan Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp58.059.025.189,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per 1 januari tahun 2023 dan 1 januari tahun 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 58,059,025,189,- dan Rp 61,861,649,919.

Defisit LO
(Rp59.284.442.076,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar (Rp59,284,442,076) dan (Rp48,195,428,553). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0,-

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk periode 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember tahun 2022 masing - masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember tahun 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-

Koreksi Atas Reklasifikasi Aset Tetap Rp0,-

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk periode periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember tahun 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0.

**Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0**

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk periode 31 Desember 2023 dan TA 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penurunan selisih revaluasi aset tetap disebabkan oleh belum dilakukannya penilaian kembali terhadap aset tetap oleh KPKNL.

**Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
(Rp 7,734,158)**

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk periode yang berakhir di 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar (Rp 7,734,158) dan Rp 0,. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

**Koreksi Lain-Lain
Rp6,537,150,-**

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk periode yang berakhir di 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp6,537,150,- dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

**Transaksi Antar
Entitas
Rp54,139,951,494,-**

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk periode yang berakhir di 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 54,139,951,494,- dan Rp 58,059,025,189,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	54.283.587.512
Diterima dari Entitas Lain	(148.856.018)
Transfer Masuk	5.220.000
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	54.139.951.494

*Diterima dari Entitas Lain (DDEL)
(Rp 148.856.018)
Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)
Rp 54.283.587.512,-*

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga periode 31 Desember Tahun 2023, DDEL sebesar (Rp 148.856.018,-) sedangkan DKEL sebesar Rp 54.283.587.512,-.

*Transfer Masuk
Rp 5.220.000,-
Transfer Keluar
Rp0,-*

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Pada periode hingga periode 31 Desember 2023, Transfer Masuk sebesar Rp 5.220.000,- dan Transfer Keluar sebesar Rp0,-.

*PHL & PPHL
Rp0,-*

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan TA 2023 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan TA 2023 adalah Rp0.

*Ekuitas Akhir
Rp 52,913,337,599,-*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp52.913.337.599 dan Rp58.059.025.189.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SEBELUM TANGGAL NERACA

- ⇒ Pada tanggal 31 Desember 2023 Pangkalan PSDKP Tual Melakukan Jurnal Penyesuaian Khusus Utang Kepada Pihak Ketiga terkait Pembayaran Uang Makan PNS selama 8 hari kerja terhitung 18 s/d 29 Desember 2023 Untuk 57 Pegawai sesuai SPM Nomor 00004T/440853/2024 tanggal 10 Januari 2024 dan Nomor SP2D 240841302000011 tanggal 15 Januari 2024 senilai Rp14.532.000,-
- ⇒ Pada tanggal 31 Desember 2023 Pangkalan PSDKP Tual Melakukan Jurnal Manual Utang Kepada Pihak Ketiga terkait Pembayaran Uang Makan PPPK selama 8 hari kerja terhitung 18 s/d 29 Desember 2023 Untuk 3 Pegawai sesuai SPM Nomor 00003T/440853/2024 tanggal 10 Januari 2024 dan Nomor SP2D 240841302000012 tanggal 15 Januari 2024 senilai Rp888.000,-
- ⇒ Pada tanggal 31 Desember 2023 Pangkalan PSDKP Tual Melakukan Jurnal Penyesuaian Khusus Utang Kepada Pihak Ketiga terkait Beban Langganan Telepon/Internet Bulan Desember 2023 yang masih harus di bayarkan pada Bulan Januari 2024 senilai Rp7.138.567,- dengan rincian sebagai berikut;
 - ✚ Tagihan Internet Kantor Pangkalan PSDKP Tual bulan Desember 2023 sebesar Rp2,700,750,-
 - ✚ Tagihan Internet Kantor Satwas SDKP Merauke bulan Desember 2023 sebesar Rp336,467,-
 - ✚ Tagihan Internet Kantor Satwas SDKP Sorong bulan Desember 2023 sebesar Rp496,950,-
 - ✚ Tagihan Internet Kantor Satwas SDKP Maluku Tenggara Barat bulan Desember 2023 sebesar Rp1,032,300,-
 - ✚ Tagihan Internet Kantor Satwas SDKP Kaimana bulan Desember 2023 sebesar Rp821,400,-
 - ✚ Tagihan Internet Kantor Wilker PSDKP Dobo bulan Desember 2023 sebesar Rp429,850,-
 - ✚ Tagihan Internet Kantor Wilker PSDKP Raja Ampat bulan Desember 2023 sebesar Rp657,400,-
 - ✚ Tagihan Internet Kantor Wilker PSDKP Fakfak bulan Desember 2023 sebesar Rp663,450,-
- ⇒ Pada tanggal 31 Desember 2023 Pangkalan PSDKP Tual Melakukan Jurnal Penyesuaian Khusus Utang Kepada Pihak Ketiga terkait Beban Langganan Listrik Bulan Desember 2023 yang masih harus di bayarkan pada Bulan Januari 2024 senilai Rp34.139.615,- dengan rincian sebagai berikut;

- ✚ Tagihan listrik utama Pangkalan PSDKP Tual Desember 2023 sebesar Rp20.824.144,-
 - ✚ Tagihan listrik darat Pangkalan PSDKP Tual Desember 2023 sebesar Rp10.003.236,-
 - ✚ Tagihan listrik kantor Satwas SDKP Merauke Desember 2023 sebesar Rp834.172,-
 - ✚ Tagihan listrik kantor Satwas SDKP Sorong Desember 2023 sebesar Rp1.939.890,-
 - ✚ Tagihan listrik kantor Wilker PSDKP Dobo Desember 2023 sebesar Rp 538.173,-
- ⇒ Pada tanggal 31 Desember 2023 Pangkalan PSDKP Tual Melakukan Jurnal Penyesuaian Khusus Utang Kepada Pihak Ketiga terkait Beban Langganan Air Bulan Desember 2023 yang masih harus di bayarkan pada Bulan Januari 2024 senilai Rp680.285,- dengan rincian sebagai berikut;
- ✚ Tagihan Air kantor Satwas SDKP Sorong bulan Desember 2023 sebesar Rp492.785,-
 - ✚ Tagihan Air kantor Satwas SDKP Maluku Tenggara Barat bulan Desember 2023 sebesar Rp130.500,-
 - ✚ Tagihan Air kantor Wilker SDKP Dobo bulan Desember 2023 sebesar Rp57.000,-
- ⇒ Pada tanggal 31 Desember 2023 terdapat sisa bahan bakar minyak (BBM) berjenis Dexlite pada Kapal Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Tual sebanyak **50,335 Liter** dengan nilai **Rp1,240,657,080,-** yang mengikuti acuan harga per-liter nya untuk wilayah Tual yaitu Rp24,648. Berikut rincian penjelasannya:
- ✚ Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Hiu Macan 06 memiliki sisa BBM jenis Dexlite sebanyak **36,765 liter** dengan nilai **Rp906,183,720,-**
 - ✚ Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Hiu 14 memiliki sisa BBM jenis Dexlite sebanyak **13,570 liter** dengan nilai **Rp334,473,360,-**
- ⇒ Rincian Aset tetap lainnya sampai dengan berakhirnya TA 2023 masih tidak ada perubahan yaitu senilai Rp142.680.000,- yang merupakan Aset Tetap Dalam Renovasi berupa **Pekerjaan Pengurukan Tanah** kantor Wilker PSDKP Raja Ampat yang hak kepemilikan tanahnya masih di miliki oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
- ⇒ Terdapat Aset yang **sudah memiliki** risalah lelang dan telah memiliki SK Penghapusan Barang Milik Negara dengan nomor 531/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2023 tanggal 31 Juli 2023 sebanyak 996 NUP dengan nilai perolehan Rp3,724,469,058,-.
- ⇒ Terdapat Kontrak yang **telah dibayarkan** kepada pihak penyedia jasa/pihak ketiga karena melewati batas waktu kontrak yaitu Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Berupa Laptop Travelmate senilai **Rp42,400,000** dengan nama Supplier PT. Celebes

Cipta Karya, NPWP. 940247695801000; Rekening Bank BRI nomor 208601000775564. Terhitung Tanggal Mulai Kontrak yaitu 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal selesai kontrak yaitu 14 Mei 2023.

- ⇒ Terdapat Pagu Anggaran Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual yang merupakan **Program Prioritas Nasional (PN)** diantaranya:
1. QHD.001 Operasi Kapal Pengawas sebanyak 105 Hari Operasi dengan nilai Pagu Anggaran Rp22,670,644,000;
 2. QHD.003 Operasi Speedboat Pengawas sebanyak 36 Hari Operasi dengan nilai Pagu Anggaran Rp2,030,668,000;
 3. RCG.001 Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat sebanyak 11 Unit dengan nilai Pagu Anggaran Rp2,894,790,000;
 4. QIC.001 Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya sebanyak 19 Pelaku Usaha/Lembaga/Laporan dengan nilai Pagu Anggaran Rp1,606,064,000;
 5. QIC.002 Unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak sebanyak 40 Pelaku Usaha/Lembaga/Laporan dengan nilai Pagu Anggaran Rp156,000,000;
 6. QIC.004 Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya sebanyak 139 Pelaku Usaha/Lembaga/Laporan dengan nilai Pagu Anggaran Rp1,642,000,000;

Adanya refocusing anggaran pada Pangkalan Pengawasan SDKP Tual pada revisi DIPA ke 14 tanggal 23 Desember 2022 menambah *tagging* PC PN pada alokasi anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Tual. Adapun alokasi anggaran yang mendapat *tagging Prioritas Nasional (PN)* setelah refocusing per periode 31 Desember 2023 rinciannya sebagai berikut:

NO	KODE OUTPUT/Sub Out	URAIAN OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI BELANJA (RP)	% SERAPAN
1	2350.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	15.280.519.000	15.279.167.267	99,99
2	2350.RCG	OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan & Lingkungan Hidup	11.685.970.000	11.685.955.266	100,00
3	2352.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	428.279.000	428.218.796	99,99
4	2353.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	428.595.000	428.504.548	99,98
TOTAL			27.823.363.000	27.821.845.877	99,99

Realisasi anggaran PN Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp27.821.645.877,- dari total alokasi anggaran Rp27.823.363.000,-.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1) Rekening Pemerintah dan NPWP Satuan Kerja.

Berdasarkan surat persetujuan kembali atas pembukaan rekening milik Pangkalan Pengawasan SDKP Tual dari KPPN Tual Nomor S-4/WPB.32/KP.03/2021 Tanggal 05 Januari 2021 bahwa pada dasarnya menyetujui pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Mandiri Cabang Tual dengan Nomor rekening **186-00-0202100-0** a.n **BPG 084 PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL**. NPWP Pangkalan Pengawasan SDKP Tual **00.172.735.3-941.000** a.n Pangkalan Pengawasan SDKP Tual.

2) Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Anggaran

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.82/MEN/KU.611/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Perubahan Ketsatu Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (terlampir) dengan rincian sebagai berikut:

EKSISTING	
<i>Kuasa Pengguna Anggaran</i>	<i>Sigit Bintoro, S.Pi</i>
	19721022 199803 1 004

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.001/KPA-LAN.6/KU.611/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tual (terlampir) dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Pejabat Pembuat Komitmen	Yopi Yuspilan, S.Pi
Pejabat Pembuat Komitmen	Zulfikar Afandy, S.Pi, M.Si
Pejabat PSPM	Zulfikar Anshari Rumakey, S.Pi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.002/KPA-LAN.6/KU.611/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tual (terlampir) dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Bendahara Pengeluaran	Junawilman Rahakbauw, A.Md,

3) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Revisi.

DIPA Petikan Tahun Anggaran 2023 Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual (440853) Nomor: SP DIPA-032.05.2.440853/2022 Tanggal 23 November 2022, kode *Digital Stamp (DS)* : 2981-0100-6709-1267 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp47.190.328.000,- (Empat Puluh Tujuh Miliar Seratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Sampai dengan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan periode TA 2023 tanggal 31 Desember 2023 ini, Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual (440853) telah melakukan revisi DIPA sebanyak 12 (dua belas) kali dengan keterangan sebagai berikut:

- **Revisi DIPA ke 01** hanya Revisi Halaman III DIPA meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual serta untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2023.
- **Revisi DIPA ke 02** hanya revisi Buka Blokir Kewenangan DJA untuk Layanan Sarana Internal (Pengadaan kendaraan Roda 4) sebesar Rp.500.000.000 karena untuk pengadaan kendaraan dinas fungsional roda 4 di Pangkalan PSDKP Tual demi menunjang kegiatan Pengawasan di lingkup Pangkalan PSDKP Tual.
- **Revisi DIPA ke 03** hanya Revisi Halaman III DIPA yang meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual serta untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2023.
- **Revisi DIPA ke 04** hanya revisi Rekomposisi Automatic Adjustment (AA) di 2352 (**RO. Unit Usaha Sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya yaitu sebesar 275.315.000**). Rekomposisi AA di lakukan karena adanya Tambahan Automatic Adjustment Ditjen PSDKP sebesar Rp2.163.275.000,00 akibat pemenuhan atas dukungan kegiatan Revitalisasi Tambak Udang di Kebumen pada Unit Kerja Ditjen Budidaya KKP serta adanya perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA pada semua Satker.
- **Revisi DIPA ke 05** meliputi Revisi anggaran:
 1. **Pergeseran anggaran antar satker;**
Pergeseran anggaran dari Stasiun PSDKP Biak ke Pangkalan PSDKP Tual. Pergeseran anggaran sebesar **Rp 54.570.000** dari 2350.QDD.001 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang dibina dalam membantu pengawasan.

2. Pergeseran anggaran antar KRO

Pergeseran anggaran dari RO 2355.CAN.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi ke RO 2355.EBB.951 Layanan Sarana Internal sebesar **Rp8.900.000**;

3. Ralat Administrasi

Perubahan Volume Output Operasional *Speedboat* karena kesalahan input pada saat penyusunan RKA K/L yaitu terinput **36** Hari Operasi seharusnya **32** Hari Operasi.

4. Perubahan volume RO

Penyesuaian volume output pada RO 2355.CAN.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa Pengadaan Pengolah Data sebanyak **18** unit menjadi **12** unit.

5. Revisi Administrasi

Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA pada semua satker;

- **Revisi DIPA ke 06** meliputi Revisi anggaran:
 1. Pergeseran Anggaran POKMASWAS dari Stasiun PSDKP Biak ke Pangkalan PSDKP Tual;
 2. Ralat Administrasi hari OPS *Speedboat* dr ke 36 hari ke 32 hari;
 3. Pengurangan volume output perangkat pengolah data dari 18 unit menjadi 12 unit;
 4. Perpindahan antar KRO dari sisa belanja perangkat pengolah data ke layanan prasarana internal.
- **Revisi DIPA ke-7** yaitu Revisi terkait Pemenuhan Belanja Pegawai P3K.
- **Revisi DIPA ke-8** meliputi Revisi anggaran:
 1. Pergeseran anggaran dari Pangkalan PSDKP Tual ke Setditjen PSDKP bersumber dari sisa kontrak pada pemeliharaan dan perawatan Kapal Pengawas serta sisa Belanja pada perangkat pengolah data dengan total Rp. 5.198.000 dan potensi sisa belanja gaji pegawai Rp.250.000.000 dalam rangka mendukung penyelesaian *Multi Years Contract* pada kegiatan Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan yang dibangun.
 2. Pergeseran anggaran dari Setditjen PSDKP ke Pangkalan PSDKP Tual Rp. 45.430.000 sebagai bentuk strategi pengawasan yang bersifat preventif (pencegahan), diperlukan penambahan cakupan jumlah wilayah dan peserta Bimtek Pokmaswas dan Penyadartahuan Masyarakat.
- **Revisi DIPA ke-9** merupakan Pergeseran Anggaran untuk menambah BBM Kapal Pengawas dan penambahan target operasi.

- **Revisi DIPA ke-10** merupakan Pergesaran Anggaran antar komponen 001 (Belanja Gaji) ke 002 (Belanja Operasional) sebesar Rp. 148.880.000
- **Revisi DIPA ke-11** merupakan Revisi Pemenuhan belanja operasional perkantoran.
- **Revisi DIPA ke-12** diantaranya :
 1. Revisi Pemenuhan belanja operasional perkantoran;
 2. Pencantuman perubahan RPD dalam halaman III DIPA serta Pemutakhiran data POK.

4) Penetapan Status BMN.

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna TA 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	17.914.787.000	-
2	Peralatan dan Mesin	81.239.556.273	-
3	Gedung dan Bangunan	18.037.392.769	98.019.350
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	24.674.199.706	-
5	Aset Tetap Lainnya (henti guna)	34.725.000	-
6	Aset Tak Berwujud	-	-
TOTAL		139.002.944.633	2.380.351.465

- Dari total Gedung dan bangunan Rp18.037.392.769,- senilai Rp17.939.373.419,- aset sudah dilakukan penetapan status penggunaan PSP dan senilai Rp98.019.350,- belum dilakukan pengajuan karena merupakan aset yang diperoleh pada Tahun Anggaran 2023.

5) Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI.

Terdapat hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Belanja Pegawai Tugas Belajar di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP, UPT Pangkalan PSDKP Tual terhitung mulai tahun 2022 s/d tahun 2023 yaitu senilai **Rp16,470,000,-** sesuai Surat Tugas Anggota IV BPK RI Nomor: 01/ST/VI/01/2024 tanggal 9 Januari 2024. Berikut akan dijelaskan secara detail berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 5.1 Rekapitulasi berdasarkan Satker

No	Nilai Kelebihan Pembayaran (Rp)				Jumlah
	Tunjangan Jabatan Fungsional 2022	Tunjangan Jabatan Umum 2022	Tunjangan Jabatan Fungsional 2023	Tunjangan Jabatan Umum 2023	
1	3.240.000	3.330.000	3.240.000	6.660.000	16.470.000
Jumlah	3.240.000	3.330.000	3.240.000	6.660.000	16.470.000

Tabel 5.2 Rekapitulasi berdasarkan Pegawai

No	Nama NIP	Nilai Kelebihan Pembayaran (Rp)				Jumlah
		Tunjangan Jabatan Fungsional 2022	Tunjangan Jabatan Umum 2022	Tunjangan Jabatan Fungsional 2023	Tunjangan Jabatan Umum 2023	
1	Seto Nugroho, S.Pi 198412212008011004	3.240.000	1.110.000	-	2.590.000	7.680.000
2	Felix Paduli, A.Md 197910112006041004	-	2.220.000	-	1.850.000	4.070.000
3	Riyan Maulana, S.Pi 199204242015031001	-	-	1.620.000	1.110.000	3.470.000
4	Hadi Purwanto, S.Pi 199204242015031001	-	-	1.620.000	1.110.000	3.470.000
Jumlah						16.470.000

- Menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Belanja Pegawai Tugas Belajar pada tabel tersebut diatas, maka:
 1. Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode Billing Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 2. Kepada Para Pegawai tersebut diatas diwajibkan untuk melakukan pembayaran;
 3. Bendahara Penerimaan menerbitkan Bukti Penerimaan Negara melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (Simponi);
- Adapun Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) Pegawai Tugas Belajar tersebut diatas adalah sebagai berikut:
 1. Seto Nugroho, S.Pi
 - a. NTPN: **C91D51JNFV2CSR7** senilai Rp3,240,000 atas pengembalian tunjangan jabatan fungsional tahun 2022.
 - b. NTPN: **3F51E7QLUP33NS90** senilai Rp1,110,000 atas pengembalian tunjangan jabatan umum tahun 2022.

- c. NTPN: **F60DD48VVEPI3T0Q** senilai Rp2,590,000 atas pengembalian tunjangan jabatan umum tahun 2023.
- 2. Felix Paduli, A.Md
 - a. NTPN: **E13752G4VPKPA0NC** senilai Rp2,220,000 atas pengembalian tunjangan jabatan umum tahun 2022.
 - b. NTPN: **4B91861QV3UAU017** senilai Rp1,850,000 atas pengembalian tunjangan jabatan umum tahun 2023.
- 3. Riyan Maulana, S.Pi
 - a. NTPN: **8AAEF6U8EUGNB4S8** senilai Rp1,620,000 atas pengembalian tunjangan jabatan fungsional tahun 2023.
 - b. NTPN: **330A57QLUP33Q1R7** senilai Rp1,110,000 atas pengembalian tunjangan jabatan umum tahun 2023.
- 4. Hadi Purwanto, S.Pi
 - a. NTPN: **5CAE32G4VPKPC39K** senilai Rp1,620,000 atas pengembalian tunjangan jabatan fungsional tahun 2023.
 - b. NTPN: **B50BF55DF9BUJ2S3** senilai Rp1,110,000 atas pengembalian tunjangan jabatan umum tahun 2023.